

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN JANUARI
TAHUN 2020**



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara – Kandangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Website : www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id
Email : pa.negara@gmail.com



PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 No.Telp/Fax (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Negara – Hulu Sungai Selatan 71254

UNDANGAN

Nomor : W15-A11/ /HM.01.2/02/2020

Negara, 13 Februari 2020

Sifat : Biasa

Hal : Undangan

Kepada Yth.

1.Hakim

2.Panitrera

3.Sekretaris

4.Pejabat Struktural dan Fungsional

5.Karyawan/ti

Pengadilan Agama Negara

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja sehubungan dengan telah dilaksanakan nya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas periode bulan Januari tahun 2020 maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis 13 Februari 2020

Waktu : 14.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

Demikian undangan ini disampaikan,atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.



Hj. Nurul Hikmah, S.Ag ,MH



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/02/02	02-01-2020	--	02-01-2020

Jenis Kegiatan : Rapat

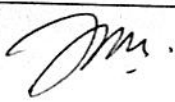
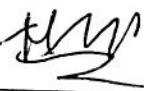
Nama Kegiatan : Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Pengaduan, WishtleBlowing System,
Benturan Kepentingan

Hari, Tgl : Kamis, 13 Februari 2020

Waktu : 14.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.

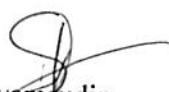
11	Nor Hendra Riyadi, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	11	
12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12	
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13	
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14	
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15	
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariat	16	CAP
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17	DL
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honorar	18	
19	Wahdah, S.H.I	Honorar	19	HCY
20	Norhikmah, S.Kom	Honorar	20	
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honorar	21	S
22	Hamri	Honorar	22	
23	Aulia Rahman	Honorar	23	
24	Nofi Arlina, SE	Honorar	24	

Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	
NOTULEN RAPAT	
Hari/Tanggal/Jam	Kamis/ 13 Februari 2020/ 14:00 WITA
Tempat	Ruang Rapat PA Negara
Pimpinan Rapat	Ketua PA.Negara
Peserta Rapat	Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf
Acara	Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan
Agenda Rapat : <i>Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan</i>	
- Rapat diawali dengan pengarahan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara - Ketua Pengadilan Agama Negara telah menerima laporan monitoring dan evaluasi atas Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan untuk periode Januari 2020 yang disampaikan melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara. - Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi bulan Januari 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat laporan pengaduan dan WBS yang diterima 2. Tidak terdapat laporan terjadinya benturan kepentingan - Ketua Pengadilan Agama Negara memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara dengan tidak adanya laporan pengaduan dan WBS menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Negara telah tergolong baik dan mampu memberikan kepuasan kepada stakeholder. - Benturan kepentingan memberikan indikasi bahwa pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan jajaran Pengadilan Agama Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bekerja secara professional dan independent. - Ketua Pengadilan Agama Negara menghimbau kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan yang prima.	

Dibuat Oleh,


Syamsudin

Negara, 13 Februari 2020

Diketahui Oleh,


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

A. Latar Belakang

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan kepentingan (*conflict of interest*), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Negara dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu *plan-do-check-action* laporan ini dibuat untuk dibuat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara.

B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan ini dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39A/SEK/SK/11/2014 tanggal 29 November 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
6. Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Januari 2020

C. Tujuan

Tujuan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah untuk memastikan langkah yang akan diambil sebagai konsekuensi dari evaluasi yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

D. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi selama periode Januari 2020, dapat dikatakan bahwa implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara masih tergolong hal yang baru, sehingga pengawasan langsung terhadap potensi terjadinya benturan kepentingan harus senantiasa ditingkatkan.
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Penanganan Benturan Kepentingan bulan Januari 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yang terjadi.
3. Bahwa dengan tidak adanya benturan kepentingan menunjukkan seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Negara, 13 Februari 2020

Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H



**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN FEBRUARI
TAHUN 2020**



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara – Kandangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Website : www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id
Email : pa.negara@gmail.com



PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 No.Telp/Fax (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Negara – Hulu Sungai Selatan 71254

UNDANGAN

Nomor : W15-A11/ /HM.01.2/01/2020

Negara, 05 Maret 2020

Sifat : Biasa

Hal : Undangan

Kepada Yth.

1.Hakim

2.Panitrera

3.Sekretaris

4.Pejabat Struktural dan Fungsional

5.Karyawan/ti

Pengadilan Agama Negara

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja sehubungan dengan telah dilaksanakan nya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas periode bulan Februari tahun 2020 maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis 05 Maret 2020

Waktu : 09.30 WITA

Tempat : Ruang Rapat

Demikian undangan ini disampaikan,atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.



Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag ,MH



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/02/02	02-01-2020	--	02-01-2020

Jenis Kegiatan : Rapat

Nama Kegiatan : Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Pengaduan, WishtleBlowing System,
Benturan Kepentingan

Hari, Tgl : Kamis, 05 Maret 2020

Waktu : 14.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.

11	Nor Hendra Riyadi, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	11	<i>[Signature]</i>
12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12	<i>[Signature]</i>
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13	<i>[Signature]</i>
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14	<i>[Signature]</i>
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15	<i>[Signature]</i>
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariat	16	CAS
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17	DL
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honorar	18	<i>[Signature]</i>
19	Wahdah, S.H.I	Honorar	19	<i>[Signature]</i>
20	Norhikmah, S.Kom	Honorar	20	<i>[Signature]</i>
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honorar	21	S
22	Hamri	Honorar	22	<i>[Signature]</i>
23	Aulia Rahman	Honorar	23	<i>[Signature]</i>
24	Nofi Arlina, SE	Honorar	24	<i>[Signature]</i>



Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	
NOTULEN RAPAT	
Hari/Tanggal/Jam	Kamis/ 05 Maret 2020/ 09:30 WITA
Tempat	Ruang Rapat PA Negara
Pimpinan Rapat	Ketua PA.Negara
Peserta Rapat	Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf
Acara	Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan
Agenda Rapat : <i>Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan</i>	
- Rapat diawali dengan pengarahan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara - Ketua Pengadilan Agama Negara telah menerima laporan monitoring dan evaluasi atas Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan untuk periode Februari 2020 yang disampaikan melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara. - Ketua Pengadilan Agama Negara menyampaikan kembali bahwa penanganan pengaduan dan whistleblowing adalah kebijakan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam PERMA No 9 Tahun 2016 dan benturan kepentingan diatur dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39A/SEK/SK/11/2014 - Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi bulan Januari 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat laporan pengaduan dan WBS yang diterima 2. Tidak terdapat laporan terjadinya benturan kepentingan - Ketua Pengadilan Agama Negara memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara dengan tidak adanya laporan pengaduan dan WBS menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Negara telah tergolong baik dan mampu memberikan kepuasan kepada stakeholder. - Benturan kepentingan memberikan indikasi bahwa pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan jajaran Pengadilan Agama Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bekerja secara professional dan independent. - Ketua Pengadilan Agama Negara menghimbau kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan yang prima.	

Dibuat Oleh,


Syamsudin

Negara, 05 Maret 2020
Diketahui Oleh,


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.



A. Latar Belakang

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan kepentingan (*conflict of interest*), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Negara dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu *plan-do-check-action* laporan ini dibuat untuk dibuat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara.

B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan ini dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39A/SEK/SK/11/2014 tanggal 29 November 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
6. Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Februari 2020

C. Tujuan

Tujuan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah untuk memastikan langkah yang akan diambil sebagai konsekuensi dari evaluasi yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

D. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi selama periode Februari 2020, dapat dikatakan bahwa implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara masih tergolong hal yang baru, sehingga pengawasan langsung terhadap potensi terjadinya benturan kepentingan harus senantiasa ditingkatkan.
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Penanganan Benturan Kepentingan bulan Februari 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yang terjadi.
3. Bahwa dengan tidak adanya benturan kepentingan menunjukkan seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Negara, 05 Maret 2020

Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H



**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN MARET
TAHUN 2020**



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara – Kandungan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Website : www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id
Email : pa.negara@gmail.com



PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 No.Telp/Fax (0517) 51421

E-mail : pa.negara@gmail.com

Negara – Hulu Sungai Selatan 71254

UNDANGAN

Nomor : W15-A11/ /HM.01.2/04/2020

Negara, 09 April 2020

Sifat : Biasa

Hal : Undangan

Kepada Yth.

1.Hakim

2.Panitrera

3.Sekretaris

4.Pejabat Struktural dan Fungsional

5.Karyawan/ti

Pengadilan Agama Negara

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja sehubungan dengan telah dilaksanakan nya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas periode bulan Maret tahun 2020 maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Kamis 09 April 2020

Waktu : 14.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

Demikian undangan ini disampaikan,atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.



Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag ,MH



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl.Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/02/02	02-01-2020	--	02-01-2020

Jenis Kegiatan : Rapat
Nama Kegiatan : Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Pengaduan, WishtleBlowing System,
Benturan Kepentingan
Hari, Tgl : Kamis, 09 April 2020
Waktu : 14.00 WITA
Tempat : Ruang Rapat

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
		Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	
NOTULEN RAPAT	
Hari/Tanggal/Jam	Kamis/ 09 April 2020/ 14:00 WITA
Tempat	Ruang Rapat PA Negara
Pimpinan Rapat	Ketua PA.Negara
Peserta Rapat	Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf
Acara	Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan
Agenda Rapat : <i>Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan</i>	
Rapat diawali dengan pengarahan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara - Ketua Pengadilan Agama Negara telah menerima laporan monitoring dan evaluasi atas Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan untuk periode Maret 2020 yang disampaikan melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara. - Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi bulan Maret 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat laporan pengaduan dan WBS yang diterima 2. Tidak terdapat laporan terjadinya benturan kepentingan - Ketua Pengadilan Agama Negara memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara dengan tidak adanya laporan pengaduan dan WBS menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Negara telah tergolong baik dan mampu memberikan kepuasan kepada stakeholder. - Benturan kepentingan memberikan indikasi bahwa pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan jajaran Pengadilan Agama Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bekerja secara profesional dan independent. - Ketua Pengadilan Agama Negara menghimbau kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan yang prima.	

Dibuat Oleh,


Syamsudin

Negara, 09 April 2020
Diketahui Oleh,


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

A. Latar Belakang

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan kepentingan (*conflict of interest*), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Negara dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu *plan-do-check-action* laporan ini dibuat untuk dibuat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara.

B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan ini dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39A/SEK/SK/11/2014 tanggal 29 November 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
6. Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan Maret 2020

C. Tujuan

Tujuan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah untuk memastikan langkah yang akan diambil sebagai konsekuensi dari evaluasi yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

D. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi selama periode Maret 2020, dapat dikatakan bahwa implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara masih tergolong hal yang baru, sehingga pengawasan langsung terhadap potensi terjadinya benturan kepentingan harus senantiasa ditingkatkan.
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Penanganan Benturan Kepentingan bulan Maret 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yang terjadi.
3. Bahwa dengan tidak adanya benturan kepentingan menunjukkan seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Negara, 09 April 2020
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H



**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
BULAN APRIL
TAHUN 2020**



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jalan Negara – Kandangan Km. 3,5 Telp / Fax (0517) 51421
Negara Kode Pos 71245 Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan
Website : www.pa-negara.pta-banjarmasin.go.id
Email : pa.negara@gmail.com



PENGADILAN AGAMA NEGARA KELAS II

Jalan Negara-Kandangan Km. 3,5 No.Telp/Fax (0517) 51421
E-mail : pa.negara@gmail.com
Negara – Hulu Sungai Selatan 71254

UNDANGAN

Nomor : W15-A11/ /HM.01.2/05/2020

Negara, 13 Mei 2020

Sifat : Biasa

Hal : Undangan

Kepada Yth.

- 1.Hakim
- 2.Panitrera
- 3.Sekretaris
- 4.Pejabat Struktural dan Fungsional
- 5.Karyawan/ti

Pengadilan Agama Negara

Di-

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja sehubungan dengan telah dilaksanakan nya monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas periode bulan April tahun 2020 maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu Saudara (i) untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : Rabu 13 Mei 2020

Waktu : 14.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

Demikian undangan ini disampaikan,atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.



Ketua

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag ,MH



PENGADILAN AGAMA NEGARA

Jl. Negara Kandangan Km.3,5 Telp.0517- 51421

Email : pa.negara@gmail.com

DAFTAR HADIR

Kode Dokumen	Tgl. Pembuatan	Tgl Revisi	Tgl. Efektif
FM/AM/02/02	02-01-2020	--	02-01-2020

Jenis Kegiatan : Rapat

Nama Kegiatan : Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Pengaduan, WishtleBlowing System,
Benturan Kepentingan

Hari, Tgl : Rabu, 13 Mei 2020

Waktu : 14.00 WITA

Tempat : Ruang Rapat

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H	Ketua	1.
2.	Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H	Wakil Ketua	2.
3.	Achmad Sya'rani, S.H.I	Hakim	3.
4.	Husnan Taparrood, S.H	Panitera	4.
5.	H. Abdul Khaliq, S.Ag	Sekretaris	5.
6.	Drs. H. Bastami	Panmud Gugatan	6.
7.	Muhammad Saleh, S.H	Panmud Permohonan	7.
8.	H. Ahmad Ramli, S.H	Panmud Hukum	8.
9.	Ahmad Abdul Hakam	Kasubag Perencanaan TI dan Pelaporan	9.
10	Zulifah, S.H	Kasubag Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	10.

11	Nor Hendra Riyadi, S.H	Kasubag Umum dan Keuangan	11	<i>[Signature]</i>
12	Dra. Halimah	Panitera Pengganti	12	<i>[Signature]</i>
13	Mustaqimah, S.H.I	Panitera Pengganti	13	<i>[Signature]</i>
14	Moh. Ramli, S.H.I	Jurusita	14	<i>[Signature]</i>
15	Syamsudin	Staf Kepegawaian dan Ortala	15	<i>[Signature]</i>
16	Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I	Staf Sekretariat	16	CAP
17	Ahmad Nafari, S.H.I	Staf Kepeniteraan	17	DL
18	Muhammad Makhluhi, S.H.I	Honorar	18	<i>[Signature]</i>
19	Wahdah, S.H.I	Honorar	19	<i>[Signature]</i>
20	Norhikmah, S.Kom	Honorar	20	<i>[Signature]</i>
21	Siti Rahmah, S.H.I	Honorar	21	S
22	Hamri	Honorar	22	<i>[Signature]</i>
23	Aulia Rahman	Honorar	23	<i>[Signature]</i>
24	Nofi Arlina, SE	Honorar	24	<i>[Signature]</i>



Wassalamualaikum Wr.Wb
Ketua Pengadilan Agama Negara

Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H
NIP. 19711117.200312.2.003

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN	
NOTULEN RAPAT	
Hari/Tanggal/Jam	Rabu/ 13 Mei 2020/ 14:00 WITA
Tempat	Ruang Rapat PA Negara
Pimpinan Rapat	Ketua PA.Negara
Peserta Rapat	Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Staf
Acara	Rapat Tindak Lanjut Monev Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan
Agenda Rapat : <i>Pembahasan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan</i>	
Rapat diawali dengan pengarahan oleh Ketua Pengadilan Agama Negara - Ketua Pengadilan Agama Negara telah menerima laporan monitoring dan evaluasi atas Penanganan Pengaduan, Whistleblowing dan Benturan Kepentingan untuk periode April 2020 yang disampaikan melalui Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara. - Berdasarkan laporan monitoring dan evaluasi bulan April 2020, diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Tidak terdapat laporan pengaduan dan WBS yang diterima 2. Tidak terdapat laporan terjadinya benturan kepentingan - Ketua Pengadilan Agama Negara memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara dengan tidak adanya laporan pengaduan dan WBS menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Negara telah tergolong baik dan mampu memberikan kepuasan kepada stakeholder. - Benturan kepentingan memberikan indikasi bahwa pelaksanaan tugas pokok dan kewenangan jajaran Pengadilan Agama Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bekerja secara professional dn independent. - Ketua Pengadilan Agama Negara menghimbau kepada seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara untuk senantiasa meningkatkan kinerja dalam rangka pelayanan yang prima.	

Dibuat Oleh,


Syamsudin



Negara, 13 Mei 2020
Diketahui Oleh,


Hj. Nurul Hikmah, S.Ag.,M.H.

A. Latar Belakang

Salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana korupsi adalah perilaku benturan kepentingan (*conflict of interest*), yang merupakan suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/atau menyingkirkan profesionalitas seorang pegawai negeri sipil dalam melaksanakan kewajibannya.

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) dan peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawah serta dalam rangka penciptaan lingkungan kerja yang bebas korupsi, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya benturan kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Negara dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugasnya.

Mengikuti siklus manajemen yang baik yaitu *plan-do-check-action* laporan ini dibuat untuk dibuat untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara.

B. Dasar Hukum

Dalam penyusunan pedoman penanganan benturan kepentingan ini dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan.
5. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 39A/SEK/SK/11/2014 tanggal 29 November 2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.
6. Laporan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan Bulan April 2020

C. Tujuan

Tujuan tindak lanjut atas hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara adalah untuk memastikan langkah yang akan diambil sebagai konsekuensi dari evaluasi yang telah dilaksanakan dalam rangka perbaikan ke arah yang lebih baik untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

D. Kesimpulan

1. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi selama periode April 2020, dapat dikatakan bahwa implementasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pengadilan Agama Negara masih tergolong hal yang baru, sehingga pengawasan langsung terhadap potensi terjadinya benturan kepentingan harus senantiasa ditingkatkan.
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Laporan Penanganan Benturan Kepentingan bulan April 2020 tidak terdapat benturan kepentingan yang terjadi.
3. Bahwa dengan tidak adanya benturan kepentingan menunjukkan seluruh jajaran Pengadilan Agama Negara telah melaksanakan tugas dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Negara, 13 Mei 2020

Ketua Pengadilan Agama Negara



Hj. Nürul Hikmah, S.Ag., M.H.